

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Sem Nggaba Kamangi

Mahasiswa. S2 MSP- FI-UKSW Salatiga

ABSTRAK

Suatu daerah akan mengalami peningkatan kualitas sumber daya manusia serta berproduktifitas ketika pembangunan sumber daya manusianya ditingkatkan. Dalam hal ini indikator yang dapat mengukur pembangunan manusia yaitu nilai Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan pemerintah dalam penanganan persoalan pendidikan dengan memperhatikan alokasi anggaran pendidikan. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan studi literatur. Hasil kajian dari 2015-2020 menunjukkan nilai APM pada tingkat SD, SMP dan SM mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, sedangkan untuk nilai APK pada tingkat SD, SMP, SM pada setiap tahun nya mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dan juga didukung dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan penduduk usia tertentu untuk bersekolah. Adapun pada APBD pendidikan di Kabupaten Sumba Timur terus ditingkat jumlahnya pada setiap tahun hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah pada bidang pendidikan, dengan memandang bahwa pendidikan bukan saja suatu bentuk formalitas tetapi sudah dijadikan investasi dimasa yang akan datang.

Kata kunci: Pendidikan, Pembangunan, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Sumba Timur

Pendahuluan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia peranan pendidikan menjadi penting untuk ditingkatkan atau dikembangkan. Bidang pendidikan bukan saja berpengaruh terhadap produktifitas, tetapi akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat (Syamsuddin, dkk 2014). Dengan tingkat pendidikan yang tinggi dalam suatu negara maka akan memiliki masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun pada lingkungan kerja.

Dalam bidang pendidikan perlu adanya hubungan kemitraan dengan berbagai pihak seperti masyarakat, keluarga dan sekolah, sehingga dana pendidikan yang dianggarkan tidak hanya dikelola sendiri oleh pemerintah (Syamsuddin, dkk 2014). Karena biaya pendidikan tersebut tidak saja bersumber dari pemerintah tetapi bersumber dari individu/ seseorang, lembaga swasta, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bahkan berasal dari luar negeri. Sehingga, ketika tingkat kesadaran masyarakat tinggi tentang pentingnya pendidikan maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan yang jelas dan realitas serta juga terarah agar pendidikan dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan.

Keseriusan pemerintah terkait pentingnya pendidikan nampak dari kebijakan strategis yang menjadi prioritas dalam APBN 2021, yaitu sektor pendidikan menjadi prioritas

utama dengan alokasi anggaran yang tertinggi dari pada beberapa sektor lainnya, di rilis oleh IPOTNEWS pada tanggal 13 Oktober 2020 bahwa anggaran pendidikan yang terbesar dengan jumlah Rp. 550, 5 triliun dari APBN 2021. Hal ini nampak bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam pembangunan manusia.

Pembangunan manusia merupakan suatu pernyataan bahwa penduduk adalah subjek dan objek karena salah satu bagian didalam pembangunan manusia yaitu pendidikan. Tolak ukur pendidikan yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) SM, dan Angka Partisipasi Kasar SD, Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi SM serta persentase APBD untuk pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu angka yang dijadikan perbandingan antara jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah dengan jumlah yang berada pada usia sekolah. (Listyaningsih, 2020). Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sumba Timur dapat dihitung berdasarkan data kelompok umur yang sedang bersekolah yaitu dari jenjang SD, SMP, SM/ sederajat. Sehingga terbagi menjadi 3 bagian pembahasan yaitu Angka Partisipasi Murni SD, Angka Partisipasi Murni SMP, Angka Partisipasi Murni SM/ sederajat, yang dapat dilihat pada tabel 1. 1 dari tahun 2015 - 2020 berikut ini:

Tabel 1. 1 APM SD, APM SMP, APM SM di Kabupaten Sumba Tiimur

Tahun	Angka Partisipasi Murni SD	Angka Partisipasi Murni SMP	Angka Partisipasi Murni SM
2015	96. 19	62. 90	63. 68
2016	96. 11	62. 98	61. 01
2017	98. 84	64. 34	54. 46
2018	96. 99	68. 82	57. 15
2019	91. 01	71. 51	67. 18
2020	90. 27	79. 78	63. 77

Sumber: data diolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal pusat data statistik pendidikan dan kebudayaan Jakarta, Kabupaten Sumba Timur 2015-2020.

APM tingkat SD

Angka Partisipasi Murni tingkat SD menunjukkan besarnya perbandingan antara murid Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A dengan penduduk berusia 7-12 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan tabel 1. 1 diatas menunjukkan bahwa yang memiliki nilai IPM tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai 98, 84. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7- 12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD Mencapai lebih dari 90% dari beberapa tahun di Kabupaten Sumba Timur, dan dipengaruhi karena jenjang tersebut bersifat wajib dari pemerintah dan adanya pengembangan sumber daya manusia yang baik. Sementara itu, nilai IPM terendah berada pada tahun 2020 dengan nilai 90, 27 hal ini disebabkan oleh adanya penduduk dengan usia yang tidak sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan rentang umur 7-12 tahun.

Untuk pengembangan pengetahuan dasar yang baik secara kognitif dan praktik, maka pendidikan dasar merupakan pendidikan yang wajib oleh semua penduduk. Oleh sebab itu, diperlukan tingkat partisipasi sekolah dasar secara kualitas dapat mempunyai bekal yang memadai dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Pengembangan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh.

APM tingkat SMP

APM pada jenjang SMP dapat diartikan sebagai perbandingan antara murid SMP, SMP LB, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan paket B dengan penduduk yang berusia 13-15 tahun, yang digambarkan dalam persentase (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan tabel 1. 1 di atas menunjukkan bahwa nilai APM tertinggi terlihat pada tahun 2020 dengan nilai 79, 78 dan nilai APM terendah terlihat pada tahun 2015 dengan nilai 62, 90. Jarak antara nilai APM dari tahun 2016-2020 cukup bervariasi dan terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat sekolah penduduk usia pada jenjang tersebut terus meningkat dan akan secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kesenjangan pendidikan.

Nilai IPM pada jenjang SMP di Kabupaten Sumba Timur juga dapat dijadikan atau digunakan untuk memberikan penilaian pada keberhasilan pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan sejak tahun 2008. Meskipun saat ini program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi 12 tahun yang tentunya ini memerlukan pengembangan yang secara rutin di Kabupaten Sumba Timur.

Terdapat beberapa hal juga yang masih menjadi persoalan utama dalam bidang pendidikan yaitu sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, di beberapa wilayah di Kabupaten Sumba Timur masih kurangnya tenaga pendidik dan adanya keterbatasan masyarakat dalam memenuhi biaya sekolah, dan juga nampak pengelolaan pada lingkup sekolah yang belum optimal serta kurang peran serta masyarakat dalam meningkatkan kinerja sekolah. Berdasarkan pada beberapa hal tersebut diperlukan perhatian khusus kepada penduduk usia sekolah maupun masyarakat untuk dapat menjangkau pendidikan dengan minimal pada tingkat usia wajib belajar. Dengan meningkat fasilitas yang diperlukan untuk mendukung atau merubah pola pikir masyarakat pada bidang pendidikan yang lebih baik. Hal ini mengingatkan bahwa pada tingkat ini jumlah anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah mempunyai angkah yang tinggi pada beberapa tahun.

APM tingkat SM/ Sederajat

APM pada tingkat SM menunjukkan perbandingan antara SMA, SMK, MA, SMLB dan Paket C, dengan rentang usia 16-18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Pada umumnya APM tingkat SM disetiap tahunnya sejak tahun 2016-2020 di Kabupaten Sumba Timur berkisar antara 54-67%. Angka ini menunjukkan nilai yang lebih rendah dari pada tingkat SD maupun tingkat SMP. Adapun Angka Partisipasi Murni tertinggi nampak pada tahun 2019 dengan jumlah 67, 18 dan Angka Partisipasi Murni terendah yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah 54, 46. Padahal pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar selama 12 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di Kabupaten Sumba Timur mempunyai daya serap atau antusias masyarakat pada usia tersebut untuk melanjutkan pada tingkat ini

cukup rendah yang dipengaruhi pada beberapa hal seperti fasilitas dan kondisi lingkungan masyarakat yang kurang mendukung dan sarana dan prasarana pada suatu wilayah yang kurang tersedia.

Mengingat bahwa APM pada tingkat SM dijadikan salah satu penyumbang kualitas pendidikan, maka IPM pada tingkat SM perlu ditingkatkan karena dapat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Oleh sebab itu, diharapkan penduduk pada usia tingkat SM mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengenyam pendidikan pada tingkat ini. Selain dari pada kesadaran penduduk juga perlu dibantu dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada tahap ini.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi partisipasi penduduk usia sekolah dalam pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikannya (Listyningsih, 2020). Untuk nilai APK dapat lebih dari

100 persen karena tidak memperhatikan ketepatan usia dalam berbagai jenjang pendidikan. Analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) ini dilakukan pada Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2015-2020 dengan jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA. dapat dilihat pada tabel 1. 2 berikut ini:

Tabel 1. 2 APK PAUD, SD, SMP dan SM di Kabupaten Sumba Timur

Tahun	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka Partisipasi KasarSD	Angka Partisipasi KasarSMP	Angka PartisipasiKasar SM
2015	99. 44	119. 78	93. 79	76. 67
2016	99. 78	119. 67	96. 85	76. 75
2017	99. 77	119. 88	97. 64	80. 22
2018	99. 88	118. 32	100. 62	83. 49
2019	-	109. 46	106. 68	85. 91
2020	-	105. 89	113. 77	95. 92

Sumber: data diolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal pusat data statistik pendidikan dan kebudayaan Jakarta, Kabupaten Sumba Timur 2015-2020.

Berdasarkan pada tabel 1. 2 di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2015 – 2020 memiliki tren Angka Partisipasi Kasar (APK) yang cenderung membaik dengan adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar disetiap tahun pada berbagai jenjang pendidikan. Untuk Angka Partisipasi Kasar PAUD cenderung stabil meskipun peningkatannya relatif kecil hal ini karena adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan penting pendidikan dasar. Pada tabel 1. 2 di atas dapat juga diketahui bahwa APK SD menunjukkan angka yang tertinggi disetiap tahun nya dibandingkan dengan APK pada jenjang yang lainnya. Tinggi APK pada jenjang SD dipengaruhi oleh pada tingkat SD merupakan jenjang yang bersifat wajib. Sedangkan jenjang SM/ sederajat menunjukkan Angka Partisipasi Kasar yangterendah, tetapi terjadi peningkatan terus pada setiap tahunnya hal ini menunjukkanadanya peningkatan pada kualitas sumber daya manusia.

Persentase APBD untuk pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencapai indeks pendidikan dalam pembangunan manusia dalam suatu daerah. Maka diperlukan suatu terobosan yang dilakukan secara persuasif kepada masyarakat ataupun penduduk dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya dijumpai adanya beberapa persoalan seperti faktor ekonomi, sosial, budaya yang sangat mempengaruhi tingginya nilai IPM, karena keterbatasan ekonomi dan faktor lingkungan menyebabkan tinggi jumlah anak putus sekolah. Sehingga banyak dijumpai adanya pekerja anak pada usia sekolah karena pada bidang pendidikan tidak semuanya gratis. Padahal dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat dijadikan modal untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki pada masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, pengeluaran APBD untuk anggaran pendidikan di Kabupaten Sumba Timur terus ditingkatkan pada setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sumba Timur tahun 2015-2020

Tahun	APBD Kab. Sumba Timur (Rp Triliun)	APBD Pendidikan (Rp Miliar)	Proporsi (%)
2015	917, 12	65, 8	7, 17
2016	1. 174, 70	283, 13	13, 10
2017	1. 197, 80	217, 80	8, 10
2018	1. 196, 16	273, 46	12, 13
2019	1. 304, 94	284, 50	13, 18
2020	-	-	-
Rata-rata			10, 74

Sumber: data diolah, Neraca pendidikan daerah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2015-2020.

Dari tabel 1. 3 di atas dapat dianalisis bahwa proporsi untuk pendanaan pendidikan yang tertinggi terlihat pada tahun 2019 dengan jumlah 13, 18 persen dan tahun 2016 dengan jumlah 13, 10 persen. Sedangkan pendanaan pendidikan yang terendah terlihat pada tahun 2015 dengan jumlah 7, 17 persen. Jika dilihat secara umum proporsi pendanaan pada bidang pendidikan dari 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan. Rendahnya persentase anggaran pendidikan tidak seperti yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan jumlah 20 persen disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya ketergantungan anggaran APBN yang cukup tinggi, sumber daya manusia yang rendah dan komponen gaji guru dan program pelatihankedinasan tidak dimasukkan.

Adapun rata-rata proporsi APBD pendidikan terhadap APBD Kabupaten dalam jangka waktu 5 tahun dengan nilai 10, 74 persen dimana proporsi tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 13, 18 persen sedangkan proporsi yang terendah terlihat pada tahun 2015 dengan jumlah 7, 17 persen. Sehingga semakin tinggi jumlah persentase proporsi anggaran APBD pendidikan terhadap UU SPN 20% maka semakin baik porsi anggaran pendidikan tersebut.

Proporsi anggaran di Kabupaten Sumba Timur terhadap Undang Undang SPN yang mengalami penurunan dipengaruhi oleh masih fokusnya pada pembangunan dan

pengembangan berbagai macam infrastruktur serta dan sarana dan prasarana. Namun demikian dengan adanya kemauan yang tinggi dari pemerintah kabupaten Sumba Timur untuk terus meningkat atau menambah proporsi anggaran pendidikan sehingga dapat tercapai 20% seperti yang sudah diamanatkan pada Undang Undang.

KESIMPULAN

Untuk mengukur kondisi pendidikan pada suatu daerah dalam hal ini di Kabupaten Sumba Timur maka dapat diketahui melalui indeks pendidikan dengan berdasarkan pada Angka Partisipasi Murni (APM) dari berbagai tingkat yaitu SD, SMP, SMA dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada berbagai tingkat yaitu dari PAUD, SD, SMP, SMA serta persentase APBD untuk pendidikan.

Berdasarkan pada data APM Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2015-2020 menunjukkan nilai APM SD tertinggi terlihat pada tahun 2017 dengan jumlah 98, 84 dan nilai APM SD terendah terlihat pada tahun 2020 dengan jumlah 90. 27. Sedangkan nilai APM SMP tertinggi nampak pada tahun 2020 dengan jumlah 79. 78 dan nilai yang terendah nampak pada tahun 2016 dengan jumlah 62. 98. Adapun nilai APM SMA yang tertinggi ditunjukkan pada tahun 2019 dengan jumlah 67. 18. Sedangkan yang terendah ditunjukkan pada tahun 2017 dengan jumlah 54. 46.

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan peningkatan yang cenderung baik pada setiap jenjang pendidikan dan yang tertinggi nampak pada tingkat APK SD hal ini karena adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dan juga didukung dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan pendudukan usia tertentu untuk bersekolah.

Terkait dengan APBD pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di setiap daerah tentunya tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan anggaran di setiap daerahnya, sehingga besaran anggaran yang telah ditetapkan tersebut akan berpengaruh dalam pelayanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfana Muhammad, Pitoyo Agus, Pramanto Tegar. 2020. *Analisis Indeks Pembangunan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia*. BLOK ASDME. Badan Pusat Statistik 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal pusat data statistik pendidikan dan kebudayaan Jakarta, Kabupaten Sumba Timur 2016-2020.

Listyningsih Umi, Alfana Muhammad, Kusmanto Yuancinofa, Waskita Taufik, Firdauzi Lalang, Maharti Adita. 2020. *Analisis Kualitas Penduduk Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Parameter Pendidikan*. Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.

Neraca Anggaran Pendidikan 2015-2019 Kabupaten Sumba Timur

Syamsuddin, Hidayat Surya, Azwan. 2014. *Analisis Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi*. Jurnal Perpektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol 1 No 4.